

Judul : Soal RUU KUP, Puteri : Harus Dibahas Mendalam dan Hati-hati
Tanggal : Senin, 20 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal RUU KUP Puteri: Harus Dibahas Mendalam & Hati-hati



Puteri Anetta Komarudin

FRAKSI Partai Golkar DPR telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983. Isinya, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9) lalu.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Puteri Anetta Komarudin menilai, pembahasan RUU tersebut perlu dibahas secara mendalam dan hati-hati.

Dia memahami, pentingnya reformasi perpajakan guna mendukung konsolidasi fiskal menuju disiplin fiskal sesuai amanat UU Keuangan Negara. Namun, upaya reformasi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa. Juga dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi.

"Tentu kita juga perlu memastikan, pembahasan nantinya berlangsung dengan komprehensif dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat," ujar Puteri, kemarin.

Legislator milenial Beringin ini menegaskan, substansi

RUU KUP yang disusun Pemerintah tersebut tidak hanya memperbarui ketentuan umum dan tata cara perpajakan saja. Tapi, juga memuat penambahan substansi baru dan mengubah ketentuan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Cukai, yang diatur dalam undang-undang terpisah serta rencana pene-naan Pajak Karbon.

Secara umum, tutur Putkom, sapaan akrab putri sulung mantan Ketua DPR, Ade Komarudin ini, dari aspek formil, dia memandang, ketentuan-ketentuan dalam RUU ini harus menghindari potensi dan celah terjadinya *aggressive tax collection*.

Sementara dari aspek materiil, dia juga mendorong agar ketentuan dalam RUU ini tidak mengarah pada pemajakan yang eksekutif.

Putkom juga menyoroti usulan pene-naan Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, maupun jasa pelayanan kesehatan medis. Dia memandang, rencana tersebut tidak tepat diberlakukan, karena menambah beban masyarakat dan berpotensi bertentangan dengan tujuan negara, baik untuk menciptakan kesejahteraan maupun investasi di bidang sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Ketua Delegasi Indonesia Y20 Summit ini juga meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terus membenahi dan meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan. Baik dalam proses pembahasan maupun setelah pengesahan RUU ini.

"Administrasi perpajakan perlu terus diperkuat," tegas wakil rakyat dari Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi Karawang, Purwakarta) ini. ■ KAL